



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BIRO UMUM
SUB UNIT KERJA : BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AKHSIN DZUL QURNAIN
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PUBLIKASI DAN HUBUNGAN MEDIA
3. NHK : 209458

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.570.000.000**

1. Tanah Seluas 29 m2 di KUDUS, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/150 m2 di KUDUS, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/150 m2 di KOTA SEMARANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 225.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 66 m2/66 m2 di SEMARANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 175.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 66 m2/60 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 356 m2/130 m2 di KUDUS, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 460.800.000**

1. MOBIL, HONDA SEDAN Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000
2. MOBIL, TOYOTA MINI BUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 196.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 29.400.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 16.400.000



5. MOBIL, SUZUKI KATANA Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp.
38.000.000
6. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
20.400.000
7. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
15.600.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	51.050.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	112.365.520
F. HARTA LAINNYA	Rp.	100.000.000
Sub Total	Rp.	2.294.215.520
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.294.215.520

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **3 Maret 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.